



POTRET PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT

KASUS BEST PRACTICE PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Anwar Sadat

POTRET PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT

KASUS BEST PRACTICE PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bermasyarakat memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang biasa disebut dengan e-government adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya. SPBE juga merupakan salah satu upaya pemangkasan biaya dan waktu, serta meminimalisir terjadinya praktik korupsi dalam pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Penerapan SPBE ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien dan efektif serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tujuan utama dari penulisan buku ini adalah untuk menggambarkan "Potret Pengembangan E-Government : Kasus Best Practice Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia", dan konsekuensi turunan dari definisi yang selama ini oleh banyak disampaikan oleh pakar dengan latar belakang keilmuan yang berbeda. selain itu, buku ini juga memuat pendekatan yang digunakan untuk memahami konsep e-government, dimulai dari pendekatan evolusioner, pendekatan definisional dan pendekatan stakeholder. kemudian di akhir buku ini, penulis menyajikan model tahapan dalam melakukan evaluasi e-government dan hibridasi model evaluasi website dari para pakar dan lembaga internasional, serta model evaluasi website yang dilakukan penulis sebagai studi kasus yang akan membagi pengalaman kepada pembaca dalam melakukan evaluasi website pemerintah daerah.

Bagian pertama memuat pendahuluan singkat mengenai Potret Pengembangan E-Government : Kasus Best Practice Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia, dan penjelasan mengenai isi buku secara keseluruhan. bagian kedua membahas mengenai tantangan dan hambatan dalam implementasi e-government. pada bagian ini disampaikan berbagai perdebatan yang terjadi di kalangan akademisi terkait dengan definisi e-government. konsekuensi dari definisi yang berbeda juga disampaikan. Bagian ketiga membahas lebih detail mengenai pendekatan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. hal ini dilakukan terlepas dari kelemahan-kelemahan pendekatan ini sebagaimana disampaikan pada bagian kedua, namun kegunaan pendekatan ini untuk membantu penstudi awal dalam mengidentifikasi tahapan-tahapan dari program e-government diharapkan bisa menambah khazanah pemahaman terkait dengan konsep e-government itu sendiri. Bagian keempat membahas e-government : prototipe inovasi pelayanan publik, bagian kelima membahas langkah-langkah taktis pengembangan e-government untuk pemerintahan daerah, Bagian keenam membahas, e-government dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, Bagian ketujuh membahas, sistem e-government terintegrasi dan terakhir membahas, kolaborasi dan e-literacy: kunci keberhasilan inovasi e-government pemerintah daerah menyajikan satu studi kasus yang pernah dilakukan oleh penulis. studi kasus ini mendeskripsikan luasnya kajian e-government yang memuat salah satunya adalah kajian mengenai evaluasi website.

Buku Potret Pengembangan E-Government : Kasus Best Practice Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia. Buku ini berisi tentang kinerja pelayanan public pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya; E-Government service: pengertian, tipe-tipe dan penerapannya di berbagai tempat; factor harapan kinerja sebagai factor pertama yang mempengaruhi pengguna untuk memanfaatkan e-government service itu; factor pengaruh social (social influence) sebagai faktor ketiga; faktor fasilitas kondisi (facilitating condition) sebagai factor keempat.

**POTRET PENGEMBANGAN
E-GOVERNMENT :
KASUS *BEST PRACTICE* PADA
PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA**

Anwar Sadat



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**POTRET PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT* :
KASUS *BEST PRACTICE* PADA PEMERINTAH DAERAH DI
INDONESIA**

Penulis : Anwar Sadat

Editor : Darmawan Edi Winoto, S.Pd., M.Pd.

Desain Sampul : Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Siwi Rimayani Oktora

ISBN : 978-623-487-872-1

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MARET 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekaediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT atas Rahman dan Rahim-Nya, sehingga Penyusunan buku referensi dengan judul “ **Potret Pengembangan *e-government* : Kasus *Best Practice* pada Pemerintah Daerah di Indonesia**“, terselesaikan dengan baik. Buku referensi ini telah di susun dengan maksimal dan mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Buku ini membahas tentang pengembangan *e-government* di Indonesia, terdapat berbagai potret yang dapat dilihat. Beberapa daerah telah berhasil mengembangkan sistem *e-government* yang efektif, sementara yang lain masih mengalami berbagai kendala dalam penerapannya. Salah satu studi kasus yang dapat dijadikan contoh adalah Kota Surabaya. Kota ini telah mengembangkan sistem *e-government* yang dikenal dengan nama "*Surabaya Single Window*". Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai layanan publik, seperti perizinan, pajak, dan sertifikasi, secara online. Namun demikian, pengembangan *e-government* pada pemerintah daerah di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan transparansi pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat, untuk mempercepat pengembangan *e-government* pada pemerintah daerah di Indonesia.

Adapun tujuan dari penyusunan buku referensi ini untuk meningkatkan motivasi bagi dosen dan mahasiswa dalam menulis buku, meningkatkan kualitas pembelajaran di perguruan tinggi, meningkatkan mutu, kualitas dan jumlah publikasi penerbitan buku untuk perguruan tinggi yang dikembangkan dari ilmu pengetahuan dan teknologi maupun diturunkan dari hasil penelitian. Oleh karenanya, dengan adanya buku referensi ini, diharapkan semakin bermunculan karya-karya Dosen dan mahasiswa dalam bentuk buku, yang telah memenuhi standar nasional, sehingga kemanfaatannya dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin sivitas akademika.

Bahwa buku ini tidak selesai begitu saja tanpa kontribusi dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi tingginya kepada semua pihak yang turut memberikan kontribusi dalam penyelesaian buku ini. Disadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga segala bentuk kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan.

Demikian agar buku ini memberikan manfaat bagi kita semua dan senantiasa mendapat Rahmat dan Karunia dari Allah Swt. Amin

Penyusun

Anwar Sadat

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB 1 POTRET PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT	1
A. Pendahuluan	1
B. Praktik Empiris Potret Pengembangan <i>E-Government</i> ...	5
C. Kendala yang Dihadapi dalam Pengembangan <i>E-Government</i>	7
D. Pengembangan <i>E-Governement</i> Dapat Lebih Optimal Di Masa Depan.....	8
E. Kesimpulan.....	24
F. Daftar Pustaka.....	25
BAB 2 TANTANGAN DAN HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT	29
A. Pendahuluan	29
B. Kesulitan Menjalankan Roda Pemerintahan Melalui <i>E-Government</i>	34
C. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi <i>E-Government</i>	37
D. Kesimpulan.....	45
E. Daftar Pustaka.....	47
BAB 3 E-GOVERNMENT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	50
A. Pendahuluan	50
B. Landasan Teori Penyelenggaraan <i>E-Government</i> Pemerintahan Daerah.....	53
C. Kerangka Hukum Penyelenggaraan <i>E-Government</i> pada Pemerintahan Daerah.....	54
D. Implementasi <i>E-Government</i> dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	56
E. Kesimpulan.....	59
F. Daftar Pustaka.....	60

BAB 4 E-GOVERNMENT : PROTOTIPE INOVASI	
PELAYANAN PUBLIK	63
A. Pendahuluan.....	63
B. <i>E-Government</i> dalam Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik.....	65
C. Praktek Baik Daerah-Daerah di Indonesia dalam Penerapan <i>e-Government</i>	69
D. Kesimpulan	74
E. Daftar Pustaka	76
BAB 5 LANGKAH-LANGKAH TAKTIS PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT UNTUK PEMERINTAHAN DAERAH.....	78
A. Pendahuluan.....	78
B. Langkah Taktis Pemerintah Daerah untuk Pengembangan <i>E-Governement</i>	80
C. Pengelolaan Administrasi Aparatur Pemerintah Daerah	82
D. Kesimpulan	84
E. Daftar Pustaka	85
BAB 6 E-GOVERNMENT DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.....	87
A. Pendahuluan.....	87
B. Definisi dan Konsep <i>E-Government</i>	90
C. Penggunaan <i>E-Government</i> dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.....	92
D. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan <i>E-Government</i>	93
E. Kesimpulan	96
F. Daftar Pusataka	97
BAB 7 SISTEM E-GOVERNMENT TERINTEGRASI.....	99
A. Pendahuluan.....	99
B. Kategorisasi <i>E-Government</i> Berdasarkan Penggunaannya	102
C. Pengembangan Sistem <i>E-Government</i> Terintegrasi Di Indonesia.....	109
D. Kesimpulan	114
E. Daftar Pustaka	115

BAB 8 KOLABORASI DAN E-LITERACY: KUNCI KEBERHASILAN INOVASI E-GOVERNMENT PEMERINTAH DAERAH	117
A. Pendahuluan	117
B. Kondisi <i>e-Government</i> Pemerintah Daerah di Indonesia	120
C. Inovasi <i>e-Government</i> Pemerintah Daerah di Indonesia	124
D. Kolaborasi Dan <i>E-Literacy</i> : Kunci Keberhasilan Inovasi <i>E-Government</i> Pemerintah Daerah.....	128
E. Kesimpulan.....	131
F. Daftar Pustaka.....	132
TENTANG PENULIS	135

DAFTAR TABEL

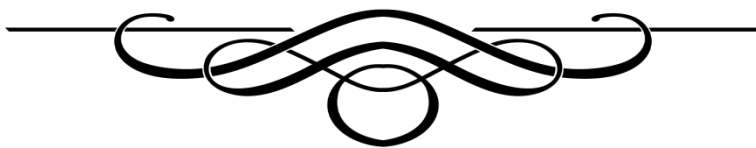
Tabel 1.1. Contoh-contoh Sistem E-government	12
Tabel 1.2. Program Unggulan, Aplikasi <i>E-government</i> yang dikembangkan dan Penghargaan Yang telah diperoleh	23
Tabel 8.1. Perbandingan Indeks Inovasi Indonesia di tingkat Dunia dan Asia	126

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Kerangka Pandang Terbentuknya E-government..	12
Gambar 2.1.	Agenda Integrasi Data untuk Pengembangan e-Gov	40
Gambar 2.2.	Masalah Pokok Aplikasi E-Government	44
Gambar 4.1.	Kerangka Arsitektur e-Government	67
Gambar 4.2.	Pola dan Acuan Standarisasi Situs Web Pemerintah Daerah sebagai Sarana Pelayanan Publik Berbasis Web.....	70
Gambar 8.1.	Grafik e-Government Development Index of Indonesia (Sumber: www.un.org).....	122
Gambar 8.2.	Grafik Perkembangan Implementasi E-Government pada Pemerintah Daerah di Indonesia	122
Gambar 8.3.	Top 99 Inovasi Pelayanan Publik.....	127



**POTRET PENGEMBANGAN
E-GOVERNMENT :
KASUS *BEST PRACTICE* PADA
PEMERINTAH DAERAH DI
INDONESIA**



BAB

1

POTRET PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT*

A. Pendahuluan

Dalam memajukan kesejahteraan wilayahnya, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kewajiban yang lebih luas dan fleksibel. Sejak saat itu, banyak dinamika dalam pelaksanaannya terjadi yang mempengaruhi baik unsur politik, ekonomi, maupun tata negara. Misalnya, pelayanan publik adalah masalah yang paling signifikan karena, secara teoritis, durasi kekuasaan yang lebih singkat membuat pelayanan publik menjadi lebih vital. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, salah satunya adalah penggunaan berbagai teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang sering disebut dengan *e-government*. (Meitika & Wicaksono, 2020)

Pemerintahan elektronik adalah istilah untuk menggambarkan bagaimana pemerintah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk melayani masyarakat dan membuat proses pemerintahan lebih efisien. *e-government* meliputi berbagai jenis layanan publik, seperti permohonan izin, pembayaran pajak, dan akses informasi pemerintah. Pengembangan *e-government* terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Beberapa contoh potret pengembangan *e-government* adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan layanan publik: *e-government* memungkinkan pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat. Misalnya,

penggunaan berbagai teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang sering disebut dengan *e-government*.

Melihat permasalahan dan kebutuhan akan sistem *e-government* di Indonesia, diharapkan pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar terhadap implementasi *e-government* dengan memperkuat konsep dan taktik. Jika dilakukan lebih serius dan dengan komitmen pemerintah, implementasi *e-government* akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga terwujud pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*).

F. Daftar Pustaka

- Antoni, D., Akbar, M., & Cholil, W. (2021). ANALISIS KEBUTUHAN LAYANAN DIGITAL E-GOVERNMENT DI PEMERINTAHAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN. *JUSIM (Jurnal Sistem* <https://jurnal.univbinainsan.ac.id/index.php/jusim/article/view/1186>
- Arief, A., & Abbas, M. Y. (2021). Kajian Literatur (Systematic Literature Review): Kendala Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). In *PROtek: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*. [scholar.archive.org. https://scholar.archive.org/work/s2bw254kcrbbnc44luy5fyaoce/access/wayback/https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/protk/article/download/1978/pdf](https://scholar.archive.org/work/s2bw254kcrbbnc44luy5fyaoce/access/wayback/https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/protk/article/download/1978/pdf)
- Elbahnasawy, N. G. (2014). E-Government, Internet Adoption, and Corruption: An Empirical Investigation. *World Development*, 57, 114-126. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.12.005>
- Fazarusda, A., & Indrayani, H. (2020). Strategi Komunikasi Pelayanan Publik melalui E-Government di Pusat Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (P3M) Kota

- Semarang. *Jurnal Ilmiah Media, Public Relations*
<https://jurnal.uns.ac.id/impresi/article/view/41147>
- Hafel, M., Jamil, J., Umasugi, M., & ... (2022). Challenges of E-Government Implementation in The Region Archipelago Characteristics. *JAKPP (Jurnal Analisis*
<http://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/21282>
- Hardjaloka, L. (2014). Studi Penerapan E-Government Di Indonesia Dan Negara Lainnya Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi Di Sektor Publik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(3), 435.
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i3.35>
- Hidayat, M. N. (n.d.). *E-government : konsep, esensi dan studi kasus.*
- Junaidi. (2011). *Dukungan E-Government Dalam Upaya Peningkatan Kualitas.* 3.
- Kumorotomo Wahyudi. (2010). (pemerintahan elektronik) barangkali dianggap kurang relevan. Bagaimana mungkin kita bicara tentang kegagalan. *Agenda*, 1-16.
- Lorita, E. (2021). E-Government Based Public Service Innovation At The Investment Office And One-Stop Integrated Service (Dpmpstsp) In Bengkulu City. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora.*
<https://penerbitadm.com/index.php/iso/article/view/75>
- Meitika, D., & Wicaksono, B. (2020). PENERAPAN ELECTRONIC GOVERNMENT (E-Gov) DALAM PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU In *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial*
- Musfikar, R. (2018). Kendala Dalam Implementasi E-Government Pada Pemerintah Kabupaten Pidie. *Cyberspace: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 2(1), 48.
<https://doi.org/10.22373/cs.v2i1.2746>

- Prasetyawan, A. J. (2022). IMPLEMENTASI PEMANFAATAN E-GOVERNMENT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & ...* <http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/19020>
- Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2008). Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. *Symposium A Quarterly Journal In Modern Foreign Literatures*, 1-15. <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=360656420083251686&btnI=1&hl=id>
- Sipahutar, I. S. . (2017). Faktor-Faktor Penentu Implementasi E-Government Pemerintah Daerah Di Indonesia Dengan dikeluarkannya Instruksi dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik E-Government. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 1393-1408.
- Sosiawan, E. A. (2008). Evaluasi Implementasi E-Government pada Situs Web Pemerintah Daerah di Indonesia: Prespektif Content Dan Manajemen. *Seminar Nasional Informatika, 2008*(November 2007), 88-98.
- Syafira, P. M., Jatnika, D. A., & ... (2022). PENERAPAN E-GOVERNMENT MELALUI APLIKASI REAL TIME BERBAGI INFORMASI (ARIMBI) DI KOTA BANDUNG TAHUN 2019-2020 (STUDI PADA DINAS *Jurnal Administrasi* <http://jurnal.unpad.ac.id/janitra/article/view/41104>
- Tui, F. P., Ilato, R., & Katili, A. Y. (2022). Inovasi Pelayanan Publik Melalui E-Government Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Gorontalo. *Publik: Jurnal Manajemen* <https://stia-binataruna.e-journal.id/PUBLIK/article/view/338>

- Wirawan, V. (2020). Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jphk/article/view/7171>
- Yunita, T., & Rahmawati, R. (2020). Pengaruh Reformasi Pelayanan Publik E-Government Terhadap Revitalisasi Penyelenggaraan Birokrasi di Kantor Imigrasi Kota Bogor. *ADMINISTRATIE Jurnal Administrasi* <https://ojs.unida.ac.id/AJAP/article/view/2750>

BAB 2

TANTANGAN DAN HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI *E-GOVERNMENT*

A. Pendahuluan

Mengapa diperlukan dan penting untuk membangun e-government? Hal ini disebabkan karena secara tradisional interaksi antara warga atau lembaga sosial dengan lembaga pemerintah selalu terjadi di kantor-kantor pemerintahan. Namun, seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), memindahkan pusat layanan pemerintah lebih dekat ke setiap klien menjadi semakin layak. Misalnya, jika pusat layanan tidak disediakan oleh instansi pemerintah, ada kios yang didekatkan dengan klien atau melalui penggunaan komputer di rumah atau di tempat usaha. *E-government* menawarkan peluang baru untuk meningkatkan kualitas pemerintahan melalui peningkatan efisiensi, layanan baru, peningkatan keterlibatan publik, dan perluasan infrastruktur informasi global. (Wirawan, 2020)

Di Indonesia, penggunaan e-government dikarenakan adanya perubahan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti peralihan dari sistem pemerintahan yang otoriter dan sentralistik ke sistem pemerintahan yang demokratis, serta penerapan keseimbangan pusat dan otoritas daerah otonom. Perubahan saat ini menuntut pembentukan pemerintahan yang bersih dan transparan yang mampu secara efektif menanggapi seruan untuk perubahan. Sistem manajemen pemerintahan yang sebelumnya merupakan hirarki kewenangan dan komando sektoral, telah bertransformasi menjadi sistem manajemen organisasi jaringan yang mampu

E. Daftar Pustaka

- Antoni, D., Akbar, M., & Cholil, W. (2021). ANALISIS KEBUTUHAN LAYANAN DIGITAL E-GOVERNMENT DI PEMERINTAHAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN. *JUSIM (Jurnal Sistem* <https://jurnal.univbinainsan.ac.id/index.php/jusim/article/view/1186>
- Arief, A., & Abbas, M. Y. (2021). Kajian Literatur (Systematic Literature Review): Kendala Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). In *PROtek: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*. scholar.archive.org. <https://scholar.archive.org/work/s2bw254krbbnc44luy5fyaoce/access/wayback/https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/protk/article/download/1978/pdf>
- Elbahnasawy, N. G. (2014). E-Government, Internet Adoption, and Corruption: An Empirical Investigation. *World Development*, 57, 114-126. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.12.005>
- Fazarusda, A., & Indrayani, H. (2020). Strategi Komunikasi Pelayanan Publik melalui E-Government di Pusat Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (P3M) Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Media, Public Relations* <https://jurnal.uns.ac.id/impresi/article/view/41147>
- Hafel, M., Jamil, J., Umasugi, M., & ... (2022). Challenges of E-Government Implementation in The Region Archipelago Characteristics. *JAKPP (Jurnal Analisis* <http://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/21282>
- Hardjaloka, L. (2014). Studi Penerapan E-Government Di Indonesia Dan Negara Lainnya Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi Di Sektor Publik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(3), 435. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i3.35>

- Hidayat, M. N. (n.d.). *E-government : konsep, esensi dan studi kasus*.
- Junaidi. (2011). *Dukungan E-Government Dalam Upaya Peningkatan Kualitas*. 3.
- Kumorotomo Wahyudi. (2010). (pemerintahan elektronik) barangkali dianggap kurang relevan. Bagaimana mungkin kita bicara tentang kegagalan. *Agenda*, 1-16.
- Lorita, E. (2021). E-Government Based Public Service Innovation At The Investment Office And One-Stop Integrated Service (Dpmpstsp) In Bengkulu City. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*. <https://penerbitadm.com/index.php/iso/article/view/75>
- Meitika, D., & Wicaksono, B. (2020). PENERAPAN ELECTRONIC GOVERNMENT (E-Gov) DALAM PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU In *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial*
- Musfikar, R. (2018). Kendala Dalam Implementasi E-Government Pada Pemerintah Kabupaten Pidie. *Cyberspace: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 2(1), 48. <https://doi.org/10.22373/cs.v2i1.2746>
- Prasetyawan, A. J. (2022). IMPLEMENTASI PEMANFAATAN E-GOVERNMENT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial &* <http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/19020>
- Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2008). Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. *Symposium A Quarterly Journal In Modern Foreign Literatures*, 1-15. <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=36>

0656420083251686&btnI=1&hl=id

- Sipahutar, I. S. . (2017). Faktor-Faktor Penentu Implementasi E-Government Pemerintah Daerah Di Indonesia Dengan dikeluarkannya Instruksi dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik E-Government. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 1393-1408.
- Sosiawan, E. A. (2008). Evaluasi Implementasi E-Government pada Situs Web Pemerintah Daerah di Indonesia: Prespektif Content Dan Manajemen. *Seminar Nasional Informatika, 2008*(November 2007), 88-98.
- Syafira, P. M., Jatnika, D. A., & ... (2022). PENERAPAN E-GOVERNMENT MELALUI APLIKASI REAL TIME BERBAGI INFORMASI (ARIMBI) DI KOTA BANDUNG TAHUN 2019-2020 (STUDI PADA DINAS *Jurnal Administrasi*
<http://jurnal.unpad.ac.id/janitra/article/view/41104>
- Tui, F. P., Ilato, R., & Katili, A. Y. (2022). Inovasi Pelayanan Publik Melalui E-Government Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Gorontalo. *Publik: Jurnal Manajemen* <https://stia-binataruna.e-journal.id/PUBLIK/article/view/338>
- Wirawan, V. (2020). Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*.
<https://journal.umy.ac.id/index.php/jphk/article/view/7171>
- Yunita, T., & Rahmawati, R. (2020). Pengaruh Reformasi Pelayanan Publik E-Government Terhadap Revitalisasi Penyelenggaraan Birokrasidi Kantor Imigrasi Kota Bogor. *ADMINISTRATIE Jurnal Administrasi*
<https://ojs.unida.ac.id/AJAP/article/view/2750>

BAB 3

E-GOVERNMENT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Pendahuluan

Pemanfaatan TIK dalam pemerintahan merupakan salah satu fenomena penting abad dua puluh satu, yang mampu mengubah “wajah” pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Akibatnya, konsep E-Government berkembang, seperti yang digambarkan secara konseptual oleh kutipan berikut:

“For more than 10 years, expectations about the Internet's potential to change the relations between citizens and their governments at the political, democratic level and with regard to public services for citizens and business have been high.” (H. Kubicek, 2011)

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji penggunaan E-Government (Electronic Government) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dari sudut pandang hukum. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government merupakan cikal bakal konsep E-Government di Indonesia. E-Government didefinisikan sebagai “penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan (selanjutnya disebut Electronic Government System atau disingkat SEP) (Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang)” selama perkembangannya. Definisi ini konsisten dengan definisi E-Government yang

Dengan adopsi teknologi informasi, pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik, mengurangi birokrasi, meningkatkan transparansi, dan mempercepat pengambilan keputusan. Selain itu, pemerintah daerah dapat memperluas akses layanan publik secara online dan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan publik.

Namun, implementasi E-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah juga menghadapi tantangan, seperti biaya investasi awal yang tinggi, kebutuhan pelatihan dan pendidikan, serta masalah keamanan data. Oleh karena itu, diperlukan adanya dukungan yang kuat dari pemerintah dan masyarakat dalam membangun infrastruktur dan mengembangkan aplikasi E-Government yang aman dan mudah digunakan.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efisien dan efektif, pemerintah daerah perlu terus memperbarui teknologi dan mengembangkan sistem E-Government secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, implementasi E-Government dapat menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan pemerintahan yang lebih baik di masa depan.

F. Daftar Pustaka

- Cane, P. (2011). *Administrative Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Darumurti, K.D. (2012). *Kekuasaan Diskresi Pemerintah*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Douglas, R. (1998). Administrative Law and Good Government. In Samford, C., & Preston, N. (Eds.), *Public Sector Ethics: Finding and Implementing Values*. (pp.122-136). London: Routledge.
- Hadjon, P.M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Penerbit Bina Ilmu.

- Kjaer, M., & Kinnerup, K. (2002). Good Governance: How Does It Relate to Human Rights? In Sano Hans-Otto., & Alfredson, G. (Eds.), *Human Rights and Good Governance*. (pp. 1-18). The Hague: Martinus Nijhoff Publishers.
- Kubicek, H., et.al. (2011). *Organizational Inter-Operability in E-Government: Lessons from 77 European Good- Practice Cases*. Berlin: Springer.
- Lucchi, N. (2016). *The Impact of Science and Technology on the Rights of the Individual*. Switzerland: Springer.
- Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Versi 19 Mei 2014).
- McCoubrey, H., & White, N. D., (1996). *Textbook on Jurisprudence*. London: Blackstone Press Ltd.
- Morgan, B., & Yeung, K. (2007). *An Introduction to Law and Regulation: Text and Materials*. Cambridge: Cambridge University Press.
- OECD Guiding Principles for Open and Inclusive Policy Making: Background Document for Session 1, Expert Meeting on 'Building and Innovative Government for Better Policies and Service Delivery, Paris,8-9 Juni 2010.
- Pimple, K.D. (2014). Introduction: The Impacts, Benefits and Hazards of PICT. In K.D. Pimple (Ed.), *Emerging Pervasive Information and Communication Technologies (PICT): Ethical Challenges, Opportunities and Safeguards*. (pp. 1-12). Dordrecht: Springer.
- Scalia, A. (1989). The Rule of Law as a Law of Rules. *The University of Chicago Law Review*, Vol. 56 (No. 4), pp. 1175-1188.
- So, B. (2003). *Public Participation in South and North Korean Environmental Laws*, SJD Dissertation (Disertasi di Bidang Doktor Ilmu Hukum), School of Law, Pace University.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

BAB 4

E-GOVERNMENT : PROTOTYPE INOVASI PELAYANAN PUBLIK

A. Pendahuluan

Saat ini, e-Government telah memberikan warna baru bagi negara-negara di seluruh dunia, dimana negara-negara berkembang saat ini fokus pada pengembangan TIK selama dua dekade terakhir, dan sebagai hasilnya, telah diakui bahwa TIK sangat penting sebagai katalisator perekonomian. perkembangan. Sementara itu, lembaga pemerintah di negara maju telah mengambil langkah progresif menuju penggunaan web dan TIK, menambahkan koherensi ke semua aktivitas lokal di internet, memperluas akses dan keterampilan lokal, membuka layanan interaktif untuk debat lokal, dan meningkatkan partisipasi warga dan regional. pengelolaan. Graham dan Aurigi, 1997).

Secara filosofis implementasi e-Government merupakan jenis pekerjaan birokrasi yang secara dinamis mengalami distorsi di lingkungan eksternal organisasi atau ada tuntutan yang mengharuskan adanya perubahan (Zulhakim, 2012:5)

Berdasarkan pemahaman tersebut, jelaslah bahwa implementasi e-Government merupakan bagian dari perubahan pola pikir birokrasi yang selama ini dianggap lamban dan penuh dengan peluang kesalahan. Namun, diperlukan perencanaan dan desain model yang matang dalam implementasi e-Government, dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut: 1) terdapat kesesuaian antara visi, misi, dan tujuan e-Government dengan visi, misi, dan tujuan pemerintah ; 2) adanya keselarasan antara sistem informasi data dan proses

4. Perlu Adanya Penguatan Masyarakat di dalam Keikutsertaan untuk Menyukkseskan Program Pengembangan *e-Government*

Mengikutsertakan masyarakat di dalam suatu proses penyelenggaraan pemerintahan merupakan bagian dari konsep *good governance*, yaitu adanya keterlibatan elemen-elemen yang dapat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan.

Dalam kesimpulannya, E-Government sebagai prototipe inovasi pelayanan publik dapat membuka peluang bagi pengembangan inovasi-inovasi lainnya yang dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik. Namun, pengembangan inovasi pelayanan publik juga memerlukan perubahan budaya dan perilaku pemerintah dan masyarakat dalam rangka mengoptimalkan penggunaan teknologi yang ada.

E. Daftar Pustaka

- Graham, S and Aurigi, A. 1997. *Virtual Cities, Social Polarisation, and the Crisis in Urban Public Space*. *Journal of Urban Technology*, 4. 1. 19-52. Melalui <http://en.wikipedia.org/> diakses 12 Desember 2015
- Indrajit, R. E. 2007. *Electronic Government in Action: Ragam Kasus Implementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia*. Yogyakarta: Penerbit ANDI
- Junaidi. 2011. *Dukungan e-Government dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia*. Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah. Banten: Lab-ANE Fisip Untirta
- Mirnasari. M. Rina. 2013. *Inovasi Pelayanan Publik UPTD Terminal Purbaya- Bungurasih*. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol 1. No I, Hal 71-84 Pathak, R., D, et al. 2008.

E-Governance, Corruption and Public Service Delivery: A Comparative Study of Fiji and Ethiopia. JOAAC, Vol 3 No. 1
Saleh, Choirul. 2012. *e-Government Sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Indonesia Antara Harapan dan Kenyataan*. Di akses di <http://chsaleh.lecture.ub.ac.id/2012/03/e-government-sebagai-inovasi-pelayanan-publik-di-indonesia-antara-harapan-dankenyataan/>

Zulhakim. A. Aziz. 2012. *Mengenal E-Government: Pemahaman Konsep Aplikasi E-Government sebagai Pelayanan Publik*. Buku Ajar Mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara. Untuk Kalangan Sendiri

Sumber lain:

Depkominfo, 2003. Buku Panduan Penyelenggaraan situs Pemerintah Daerah. <http://dokumen.tips/documents/penerapan-e-government-di-indonesia.html>.

BAB 5

LANGKAH-LANGKAH TAKTIS PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT* UNTUK PEMERINTAHAN DAERAH

A. Pendahuluan

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan bidang yang berkembang pesat. Pesatnya perkembangan TIK akan menciptakan peluang dan tantangan untuk menciptakan, mengakses, mengolah, dan memanfaatkan informasi secara tepat dan akurat. Di era globalisasi, informasi merupakan komoditas yang sangat berharga yang harus dikuasai guna meningkatkan daya saing suatu organisasi (termasuk pemerintah daerah) secara berkelanjutan (Agarwal, 2013).

Di era serba teknologi, sudah saatnya pemerintah mempercepat pembangunan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Janji teknologi informasi dan komunikasi adalah efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan global, dan transparansi. Oleh karena itu, di era otonomi daerah ini, salah satu upaya mewujudkan good governance adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Istilah lain yang lebih populer adalah e-Government.

Menanggapi tantangan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia berinisiatif mengembangkan kebijakan pemanfaatan TIK untuk membangun Electronic Government for Good Governance yang terintegrasi, dimulai dari tingkat pemerintah daerah hingga ke pusat. Tujuannya agar infrastruktur TIK yang dibangun dapat digunakan secara kolaboratif untuk koordinasi seluruh instansi, baik pusat maupun daerah.

Dalam rangka mengembangkan *e-government*, pemerintah daerah harus memperhatikan beberapa langkah taktis yang telah dijelaskan sebelumnya. Kesimpulan dari langkah-langkah taktis tersebut adalah bahwa pemerintah daerah harus mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan memastikan bahwa layanan *e-government* dapat diakses oleh semua orang, meningkatkan literasi digital masyarakat, membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang memadai, membangun sistem manajemen konten yang efisien, meningkatkan interaksi dengan masyarakat melalui media sosial dan aplikasi, serta menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi dalam memberikan layanan publik. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memastikan keamanan siber dan perlindungan data yang terkait dengan layanan *e-government*, serta membangun aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan yang lebih mudah dan efektif bagi masyarakat. Dengan mengikuti langkah-langkah taktis tersebut, pemerintah daerah dapat mengembangkan *e-government* yang efektif dan memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat.

E. Daftar Pustaka

- Agarwal, P.K., "Portals: the path to everything:" *Government Technology*, March, www.govtech.net
- Bastian. *Perkembangan E-Government di Indonesia*. Sinar harapan 2003
- Center for Democracy and Technology (CDT) and InfoDev, "E-Government Handbook: Part 1- The Three Phases of E-Government", <http://www.cdt.org/egov/handbooypart1.shtml>.
- Hasibuan, Zainal A., Harry Budi Santoso. *Standardisasi Aplikasi E-Government Untuk Instansi Pemerintah*. Paper e-Indonesia Initiatives Forum 2005.

- Hasibuan, Zainal, A. *Pengembangan Prototipe Kerangka Aplikasi E-Government, Studi Kasus : Sistem Informasi Kependudukan*. Paper e-IndonesiaInitiatives Forum 2006.
- Heeks, Richard. 2001. Understanding e- Governance for Development. i- Government Working Paper Series, Paper No. 11, Institute for Development Policy and Management, University of Manchester
- Inpres RI Nomor 3 Tahun 2003, *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E- Government*.
- Kepmen Komunikasi dan Informasi Nomor 57/Kep/M.Kominfo/12/2003, *Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government*.
- The World Bank Group, "A Definition of E-Government" http://www1.worldbank.org/publicsector/egov/defin_itioahtm [online] September 2013.
- Hariri, M. H. (2015). E-Government Adoption in Local Government: Strategies and Challenges. *International Journal of Public Administration in the Digital Age (IJPADA)*, 2(3), 1-18.
- Singh, H. (2016). E-Governance in India: Implementation Challenges for Local Governments. *Journal of e-Governance*, 39(1), 1-8.
- Kumar, N. (2014). E-Governance in India: Concept, Initiatives and Issues. *Journal of e-Governance*, 37(2), 1-9.

BAB 6 | E-GOVERNMENT DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

A. Pendahuluan

E-Government atau pemerintahan berbasis elektronik dapat menjadi sarana yang efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks *e-government*, pelayanan publik dapat dilakukan secara online, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi dalam memberikan layanan publik.

Berikut ini beberapa manfaat dari *e-government* dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik:

1. Efisiensi - *e-government* memungkinkan penggunaan teknologi untuk mempercepat dan mempermudah proses pelayanan publik. Dengan demikian, waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk memberikan layanan publik dapat ditekan.
2. Aksesibilitas - Dalam *e-government*, layanan publik dapat diakses kapan saja dan dari mana saja melalui internet. Hal ini dapat membantu meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik bagi masyarakat yang tinggal di wilayah yang sulit dijangkau.
3. Transparansi - *e-government* dapat meningkatkan transparansi dalam memberikan pelayanan publik dengan cara mengurangi kesempatan untuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, informasi mengenai pelayanan publik dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.

memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah antara lain memperbaiki infrastruktur teknologi informasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan menetapkan regulasi dan standar yang jelas untuk penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan.

Partisipasi masyarakat dalam penggunaan layanan *e-government* juga menjadi hal yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Masyarakat yang aktif menggunakan layanan E-Government dapat memberikan umpan balik dan masukan yang berguna bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat meningkatkan transparansi, menghemat biaya, dan memberikan tekanan kepada pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Secara keseluruhan, penerapan *e-government* dapat membawa banyak manfaat bagi pemerintah dan masyarakat, terutama dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Namun, untuk mencapai tujuan ini, perlu dilakukan upaya yang berkelanjutan dalam meningkatkan infrastruktur, SDM, dan regulasi yang mendukung penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan.

F. Daftar Pustaka

- Akhmad Safik, dkk. (2018). "E-Government Implementation In Indonesia: A Review". *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, Vol. 9, No. 8.
- Ali, M. (2019). "E-Government Implementation in Indonesia: Progress and Challenges". *Journal of Public Administration and Governance*, Vol. 9, No. 1.
- Irawan, N. (2018). "E-Government Adoption in Indonesia: A Review of Success and Challenges". *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 8, No. 2.

- Lestari, E., & Budhiarto, A. (2019). "E-Government Implementation in Indonesia: Opportunities and Challenges". *International Journal of Computer Science and Information Technology Research*, Vol. 7, No. 2.
- Wibowo, A. (2020). "E-Government and Public Services in Indonesia: A Literature Review". *Journal of Public Administration and Governance*, Vol. 10, No. 4.
- Yanto, H. (2019). "E-Government Development in Indonesia: A Literature Review". *Journal of Government and Politics*, Vol. 10, No. 3.
- Ministry of Communication and Informatics, Republic of Indonesia. (2016). "Indonesian E-Government Masterplan 2015-2019".
- United Nations Public Administration Network. (2018). "E-Government Development Index 2018: Report".
- World Bank. (2020). "World Development Report 2020: Trading for Development in the Age of Global Value Chains".
- World Economic Forum. (2018). "The Global Competitiveness Report 2018".

BAB 7 | SISTEM E-GOVERNMENT TERINTEGRASI

A. Pendahuluan

Sistem *e-government* terintegrasi adalah sebuah konsep di mana seluruh sistem pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah diintegrasikan menjadi satu sistem yang terpusat dan terkoneksi satu sama lain. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, serta mempermudah akses dan penggunaan layanan oleh masyarakat. Dalam sistem *e-government* terintegrasi, seluruh informasi dan data yang dibutuhkan oleh lembaga pemerintah dapat diakses secara terpadu, sehingga memudahkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan cepat. Selain itu, dengan adanya sistem *e-government* terintegrasi, masyarakat dapat mengakses seluruh layanan publik yang tersedia dengan satu kali login, tanpa harus mengisi ulang data pribadi mereka secara berulang-ulang.

Penerapan sistem *e-government* terintegrasi di Indonesia masih terus dikembangkan. Beberapa inisiatif dan proyek yang sedang berjalan antara lain Sistem Informasi Satu Pintu (SISPINTAR) dan Integrasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (InSIPPAD). SISPINTAR adalah sistem yang memungkinkan masyarakat mengakses seluruh layanan publik yang disediakan oleh pemerintah dengan satu pintu masuk, baik melalui website maupun mobile apps. Sedangkan InSIPPAD bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh sistem informasi pemerintah daerah, mulai dari keuangan, perencanaan, hingga pelayanan publik. Namun, implementasi sistem *e-government* terintegrasi masih

melakukan audit keamanan secara rutin. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk memperkuat sistem keamanan dan meminimalkan risiko keamanan. Dalam jangka panjang, pengembangan sistem e-government terintegrasi di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini akan membawa manfaat bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan.

E. Daftar Pustaka

- Anggriawan, F. R., & Nugroho, R. A. (2020). Implementasi Sistem E-Government Terintegrasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kota Tangerang. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 4(6), 6592-6601.
- Fitri, D., & Khansa, M. F. (2019). Pengembangan Sistem E-Government Terintegrasi di Indonesia: Studi Kasus Kota Bandung. *Jurnal Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi*, 5(1), 94-101.
- Mardiana, A., & Khansa, M. F. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Government Terintegrasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Teknologi dan Informasi Asia*, 13(2), 61-68.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2018). *Roadmap E-Government Indonesia 2018-2022*. Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Kurnia, A., & Nugroho, R. A. (2019). Pemanfaatan Sistem E-Government Terintegrasi untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah. *Jurnal Informatika Mulawarman*, 14(2), 37-45.

- Kurniawan, A. P., & Alfitra, R. (2020). E-Government Terintegrasi: Konsep, Tantangan, dan Peluang. *Informatika Mulawarman: Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer*, 15(2), 137-145.
- Pratama, F. R., & Ariyanto, H. (2019). Analisis Potensi Risiko Keamanan Implementasi E-Government di Indonesia. *Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer*, 7(3), 141-148.
- Prawira, A. S., & Supriyanto, A. (2019). Analisis Pengaruh E-Government Terintegrasi Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Sains dan Teknologi*, 8(2), 139-146.
- Susanto, A., & Handayani, P. W. (2019). Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Implementasi E-Government Terintegrasi. *Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*, 7(1), 1-12.
- Zulkarnain, A., Yasin, M., & Azhar, M. (2018). Evaluasi Implementasi E-Government Terintegrasi dalam Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Manajemen Informatika*, 6(2), 84-94.

BAB 8

KOLABORASI DAN *E-LITERACY*: KUNCI KEBERHASILAN INOVASI *E-GOVERNMENT* PEMERINTAH DAERAH

A. Pendahuluan

Di Indonesia, e-government diterapkan setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government. Instruksi Presiden ini dibuat sebagai dasar untuk menyelaraskan pandangan pemerintah dalam melaksanakan sistem pemerintahannya guna mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sistem pemerintahan ini berfungsi sebagai alat penghubung antara pemerintah dengan pemerintah (G2G), pemerintah dengan pegawainya (G2E), dan pemerintah dengan masyarakat (warga negara) (G2C) (Maulana et al., 2019: 409-410).

Perkembangan e-government di Indonesia saat ini dinilai belum optimal, padahal sudah berjalan selama 16 tahun, dimulai tahun 2003, dengan hasil yang mengecewakan. Menurut global e-government development index (EDGI), perkembangan e-government di Indonesia tidak memberikan peningkatan yang signifikan, dengan selisih kenaikan hanya 0,1 dari tahun 2003 hingga 2018. Kegagalan ini disebabkan oleh pengabaian pemerintah terhadap e-government. pembangunan di Indonesia (Ordiyasa, 2015: 59). Hal ini didukung oleh penelitian selanjutnya tentang analisis penggunaan web oleh pemerintah daerah dalam pengembangan e-government. Jumlah pemerintah daerah yang telah mengembangkan e-government meningkat menjadi 4 (empat) pemerintah daerah, atau 0,7% dari

berbagai masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan layanan publik. Sedangkan *e-literacy*, atau literasi digital, merupakan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif. Kemampuan *e-literacy* yang baik akan memudahkan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan layanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah melalui platform digital. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan program pelatihan *e-literacy* kepada masyarakat agar mereka mampu menggunakan aplikasi *e-government* dengan baik. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memastikan keamanan dan perlindungan data pribadi masyarakat yang terkait dengan penggunaan layanan *e-government*.

F. Daftar Pustaka

- Andhika, L. R. (2018). Elemen dan Faktor Governansi Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah. *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan*, 6(03), 207-222. <https://doi.org/10.35450/jip.v6i03.112>
- Ahmad, T., & Islam, M. R. (2019). E-government development in Bangladesh: An analysis of challenges and prospects. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 70(10), 1097-1107.
- Alshehri, M., & Drew, S. (2020). E-government adoption and public sector innovation: An empirical study of Saudi Arabia. *Technological Forecasting and Social Change*, 153, 119976.
- Alshehri, M., & Drew, S. (2021). E-government and public sector innovation in Saudi Arabia: A critical analysis of success factors. *International Journal of Public Administration*, 44(7), 561-573.
- Cornell University, INSEAD, & WIPO. (2019). *Global Innovation Index 2019: Creating Healthy Lives-The Future of Medical*

- Innovation*. (S. Dutta, B. Lanvin, & S. Wunsch-Vincent, Ed.) (12th Edition). Geneva: World Intellectual Property Organization (WIPO).
- Janssen, M., Wimmer, M. A., & Deljoo, A. (2015). The Impact of e-Government Use on Trust in Government and Trust in Democracy. *Electronic Government*, 14(1), 1-12.
- Kurniawan, H. (2019). Implementation of e-Government to Improve Public Services: Collaboration and E-Literacy. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 415, 241-246.
- Lee, H. J., & Choi, Y. (2018). How does citizen participation in e-government influence trust in government? Testing the transparency, accountability, and capability mediators. *Government Information Quarterly*, 35(4), 630-643.
- Moon, M. J., & Welch, E. W. (2017). Public values and civic engagement: A comparative study of Korea and the United States in e-government. *Government Information Quarterly*, 34(3), 524-532.
- Maulana, R. Y., Bafadhal, F., Agnes, S., Andayani, P., & Nisa, N. (2019). Strengthening Collaborative Government in The Open Government Era Based on The Utilization of E-Government in Jambi Province. In *International Conference on Governance Innovation and Social Sciences (ICOGISS)* (hal. 401-413).
- Novianto, R., Supriyanto, A., & Sukarsa, H. (2020). E-Government and Inter-Organizational Collaboration to Improve Government Performance. *Journal of Government and Politics*, 11(3), 544-562.
- Saeed, A., & Abdou, H. A. (2018). E-government readiness and success: The role of innovation and collaboration in Arab countries. *Government Information Quarterly*, 35(1), 86-99.

United Nations Development Programme. (2016). E-Government Development Index 2016. Diakses dari <https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/e-government-development-index-2016.html>

TENTANG PENULIS

Anwar Sadat adalah Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Buton. Minat penelitiannya adalah Governance, Government Finance, Government bureaucracy, dan ICT Government yang telah dipublikasikan di Jurnal Bereputasi Nasional dan Internasional, seperti Journal of Governance, Studies in Media and Communication, Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance, PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan, Jurnal Internasional Sains, Teknologi & Management, Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik, Mamangan Social Science Journal. Ia juga merupakan penulis Tata Kelola Keuangan Pemerintah, Akuntansi Pemerintahan, dan Perbandingan Sistem Politik dan Pemerintahan. Juga seorang Reviewer untuk MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi, Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan, dan JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan.

Google Scholar : RsbVbHEAAAAJ&hl

SINTA ID : 6824246

Scopus ID : 57207467581

WOS Researcher ID : N-8324-2018

ID ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9813-2145>